

# Sejarah Perbudakan (Jangan) Berlanjut!

Oleh: Hendra Kurniawan

SEWAKTU membuka kalender bulan Mei 2014, saya menemukan ada beberapa tanggal merah selain di hari Minggu yang berarti libur. Salah satunya tanggal 1 Mei 2014 yang cukup menarik perhatian saya karena ini pertama kalinya Hari Buruh dijadikan sebagai hari libur nasional. Keputusan ini diambil melalui Kepres Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 yang isinya menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan ini bahwa Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei selalu diperingati secara rutin oleh para pekerja atau buruh di seluruh wilayah NKRI.

Tentu keputusan ini disambut baik oleh para pekerja atau buruh. Bagi pengusaha atau para pemilik modal juga semestinya tidak memperlakukan penambahan hari libur ini, tokh biasanya setiap tanggal 1 Mei kegiatan perusahaan juga tidak berjalan lancar karena para pekerjaannya melakukan aksi demo. Selain itu peringatan Hari Buruh Internasional diharapkan berguna untuk membangun kebersamaan antar pelaku hubungan industrial agar lebih harmonis secara nasional.

Jika dalam judul saya menyebut istilah budak tentu memiliki maksud tertentu. Kaum buruh bukanlah budak. Akan tetapi, sangat miris jika di dalam sebuah negara yang merdeka ini, kaum buruh masih diperlakukan seperti budak. Perbudakan biasa terjadi di negara yang dijajah atau negara yang masih jauh dari sentuhan perjuangan hak asasi manusia. Akan tetapi masyarakat Indonesia pernah beberapa kali dikejutkan dengan pemberitaan terbongkarnya praktik perbudakan entah di *home industry* maupun terhadap pembantu rumah tangga. Salah satunya, fenomena tidak beradab ini pernah terjadi di Tangerang sekitar awal tahun 2013. Tangerang notabene tidak jauh dari jangkauan pusat pemerintahan negeri ini, namun praktik pelanggaran kemanusiaan tetap saja dapat terjadi.

## Perbudakan di masa kolonial

Sejenak pikiran kita melayang ke masa lalu. Sejarah bangsa ini pernah mencatat bahwa sebelum Indonesia berdiri, ada banyak praktik eksploitasi manusia yang tidak manusiawi. Herman Willem Daendels, orang Perancis yang menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda antara tahun 1808-1811, pernah memerintahkan pembuatan jalan dari Anver-

Jawa Barat hingga Panarukan, Jawa Timur. Pembangunan jalan ini memanfaatkan tenaga rakyat dengan sistem kerja rodi. Di bawah ancaman dan hukuman, rakyat bekerja dari menguruk tanah hingga menembus bukit Cadas Pangeran yang sangat sulit harus mereka lakukan. Meskipun pada akhirnya Inggris tetap berhasil masuk ke Pulau Jawa, namun bagi pemerintah jajahan, selesainya pembuatan jalan ini merupakan suatu keberhasilan. Bagi bangsa kita ini adalah pil pahit kekejaman yang luar biasa. Banyak jiwa yang mati dalam pembangunan jalan tersebut.

Pada kurun waktu 1830-1870, pemerintah Kolonial Belanda menerapkan sistem penanaman wajib (*cultuurstelsel*) bagi para petani di bawah ancaman penguasa desa sebagai alat birokrasi. Tanam paksa yang dilakukan di daerah gubernemen di hampir seluruh wilayah Jawa membuat para petani yang tidak memiliki tanah harus memberikan tenaganya sebagai ganti rugi. Penguasa desa yang haus akan uang menuntut rakyatnya untuk bekerja lebih agar dapat menyerahkan hasil tanam yang semakin besar bagi pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam buku *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi* (1991), sejarahwan Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo menuliskan mengenai berbagai penyimpangan tanam paksa. Pada masa tanam paksa ini selain ada kerja wajib di tanah-tanah pertanian, dilakukan pula kerja wajib umum (*heerendiensten*) yang mencakup pembuatan atau perbaikan jalan, pembuatan gedung perkantoran, penjagaan tawanan, dan sejenisnya. Pengerahan tenaga kerja seringkali dilakukan jauh dari tempat tinggal dan tidak mendapatkan upah yang layak. Justru kondisi keuangan yang lebih baik dirasakan oleh para birokrat yang mendapatkan uang insentif (*cultuurprocenten*) atas keberhasilannya mengeksploitasi tenaga rakyat.

## Praktik Poenale Sanctie

Perbudakan tidak hanya berarti eksploitasi tenaga manusia, namun juga lengkap dengan hukuman apabila budaknya bersalah atau melawan. Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *poenale sanctie* pada tahun 1880. *Poenale sanctie* yaitu peraturan yang memuat ancaman hukuman badan (kurungan dan pu-

kulan) bagi kuli-kuli yang melanggar peraturan kerja. Tujuan utama dari aturan ini yaitu menjamin tenaga buruh bagi majikan, juga membatasi kemerdekaan buruh untuk meninggalkan perkebunan tempat bekerja.

Perlakuan buruk terhadap buruh kerap terjadi misalnya seorang kuli dipaksa bekerja dengan kekerasan dan diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan Belanda. Pukulan dengan rotan, penahanan, penelanjangan, dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya. *Poenale sanctie* menambah kesengsaraan rakyat Indonesia dan memperpanjang daftar pelanggaran HAM yang dilakukan Belanda. Hal ini menuai kecaman yang juga datang dari kaum humanis Belanda sendiri. Pada akhirnya, Majelis Rendah Belanda mengajukan protes atas *poenale sanctie* ini yang baru dicabut tahun 1941.

Jan Breman dalam bukunya yang berjudul *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatra Timur pada Awal Abad Ke-20* (1997) menyebutkan bahwa *Poenale Sanctie* ternyata juga diterapkan di negara jajahan Inggris dan Perancis. Hukuman berupa pukulan dan tendangan semau-maunya dari majikan kepada para budaknya dilakukan atas nama penanaman kedisiplinan. Terhadap budak yang membangkang maka hukuman cambuk hingga tiang gantungan siap menanti.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) ternyata praktik perbudakan tidak juga lenyap. Pada masaini rakyat diminta mengerahkan tenaganya melalui romusha untuk melakukan pembangunan-pembangunan fisik dalam upaya mendukung Jepang menghadapi Sekutu dalam Perang Pasifik. Tidak hanya kaum pria, banyak pula wanita yang di usia masih belia dipaksa untuk menjadi budak seks bagi tentara Jepang. Seumur hidupnya bekas jugunianfu ini terus menyisakan sakit dan trauma akibat pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan tentara Jepang.

## Perbudakan abad 21

Perjuangan hak asasi manusia yang sudah berlangsung lama ternyata kini masih sangat jauh dari hasil. Kenyataan bahwa masih ada praktik perbudakan di negeri ini menjadi bukti. Dalam kasus di Tangerang tahun lalu, para buruh yang bekerja di pabrik peralatan

rumah tangga itu tidak diberi upah semestinya, makanan dan tempat tinggal yang ada tidak layak, kondisi kamar mandi yang sangat memprihatinkan bahkan banyak di antara mereka yang selama empat bulan tidak berganti pakaian. Mereka juga mendapatkan hukuman dan ancaman bila mereka melanggar aturan, melawan, atau mencoba melarikan diri. Demikian juga dengan kasus penyekapan terhadap beberapa pembantu rumah tangga yang mencuat pada awal tahun 2014 ini. Berbagai kondisi tersebut tidak ada bedanya dengan sistem *poenale sanctie* yang sudah dihapuskan di Hindia Belanda 72 tahun yang lalu.

Lebih ironis lagi ketika diberitakan bahwa ternyata penduduk yang tinggal di sekitar rumah pelaku ternyata selama ini berusaha menutupi kenyataan tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka rela menjadi centeng yang siap mengancam dan memberikan hukuman bagi para buruh yang berani melawan atau melarikan diri. Pelaku juga tidak segan berlindung di balik kekuasaan lurah dan camat setempat hingga aparat yang banyak menjadi sahabat baik pelaku. Perilaku masyarakat sekitar, birokrat, dan aparat yang turut melanggengkan praktik eksploitasi manusia ini tentu tidak lepas dari permainan uang dan kekuasaan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penerapan sistem insentif (*cultuurprocenten*) pada masa tanam paksa hampir dua abad yang lalu.

Fenomena tak berbudaya ini bukan hanya menjadi perjuangan Komnas HAM atau para pejuang HAM saja. Ini sentilan bagi rasa kemanusiaan universal yang semestinya masih dimiliki masyarakat Indonesia yang beradab. Ini tamparan untuk menyadarkan birokrat dan aparat negara pada tugasnya sebagai pengayom masyarakat yang tegas, jujur, bersih, dan berwibawa. Harapan inilah yang tersisa ketika menyaksikan drama perbudakan di abad modern sekarang ini masih saja dipertunjukkan. Tidak sekedar menjadikan Hari Buruh Internasional sebagai hari libur, namun sudah saatnya untuk mulai memberi ruang dan perhatian bagi kemanusiaan dan kesejahteraan kaum buruh. Jangan sampai terjadi kelanjutan sejarah perbudakan bagi bangsa kita. Ingat Indonesia sudah merdeka Bung! \*\*\*

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.